

Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar

Suci Putri Astiti¹, Fiviyanti Hasim², Reski Alfiani³

^{1,2,3} Politeknik LP3I Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

suciputriastiti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, serta staf keuangan yang bertugas sebagai operator SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES memberikan dampak nyata pada lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sistem ini mampu menghadirkan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, kualitas laporan keuangan desa meningkat secara signifikan serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Village Financial System (SISKEUDES) in improving the quality of financial reports in Parak Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation. The research informants included the Village Head, Village Treasurer, and financial staff who serve as SISKEUDES application operators. The findings indicate that the implementation of SISKEUDES has had a significant impact on the five stages of village financial management, namely planning, budgeting, administration, reporting, and accountability. The system produces financial information that is relevant, reliable, comparable, and understandable in accordance with the qualitative characteristics of financial statements as stated in the Government Accounting Standards (SAP). Thus, the quality of village financial reports has improved significantly, while strengthening transparency, accountability, and good governance at the village level.



Mengutip artikel ini sebagai : Astiti, S.P., Hasim, F., Alfiani, R., 2025. Evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. *Tangible Jurnal*, 10, No. 2, Desember 2025, Hal. 278-293. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.695>

Volume 10

Nomor 2

Halaman 278-293

Makassar, Desember 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

14 November 2025

Tanggal diterima

22 November 2025

Tanggal dipublikasi

1 Desember 2025

Kata kunci :

SISKEUDES, Laporan Keuangan, Dana desa, Standar Akuntansi Pemerintahan

Keywords :

SISKEUDES, Financial Report, Village Funds, Government Accounting Standards

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien (Rahmawati dan Fajar, 2017). Sistem informasi pengelolaan keuangan desa sebagai alat terpadu yang dijadikan alat bantu pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengimplementasian berbagai regulasi

dibidang pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (www.djkd.kemendagri.go.id).

Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengungkapan dalam bentuk laporan digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Hajri & Razak, 2023).

Tata kelola pemerintahan desa termasuk didalamnya pengelolaan dana desa berada di bawah naungan Kementerian Desa. Dimana kualitas laporan keuangan desa juga merupakan indikator untuk penilaian kinerja pemerintah desa khususnya serta kementerian desa pada umumnya (Danuta, 2017). Kualitas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan dapat diukur dengan membandingkannya dengan pendapat dari BPK atas hasil audit yang dilakukan. Dalam kurung waktu 2 tahun terakhir audit BPK terhadap kementerian desa menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, namun baru-baru ini terdapat pernyataan dari lembaga independen KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyatakan bahwa hasil audit BPK atas kementerian desa disangsikan kebenarannya karena adanya dugaan suap terhadap oknum BPK, serta adanya permintaan dari beberapa pihak untuk dilakukan audit ulang. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Kementerian Desa masih kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Desa Parak yang berada di Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah salah satu desa yang telah mengevaluasi aplikasi SISKEUDES. Namun, evaluasi suatu sistem baru tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat memengaruhi efektivitasnya, seperti: Tingkat literasi digital aparat desa, Dukungan teknis dari pemerintah kabupaten, infrastruktur teknologi informasi, Komitmen dalam menjalankan sistem sesuai prosedur. Dalam konteks ini, perlu dilakukan penelitian untuk mendalami bagaimana pelaksanaan SISKEUDES di lapangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan desa, terutama di desa parak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat desa dalam menerapkan SISKEUDES.

Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan ialah agar memudahkan para pemakai memahami informasi dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dibuat untuk mengambil keputusan, alat akuntabilitas publik, serta memberikan informasi yang diterapkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, maka dalam setiap membuat laporan keuangan harus memenuhi kriteria atau sesuai dengan aturan yang telah diterapkan supaya laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, dan akurat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Setiap kegiatan yang terkait Keuangan Desa merupakan kewajiban dari desa itu sendiri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola. Menurut Harjanti, (2019), pemerintah dalam mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik. Melalui aplikasi ini, desa memperoleh kemudahan dalam kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa dan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di desa Parak kecamatan Bontomanai kabupaten kepulauan Selayar? dan untuk mengetahui evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di desa Parak kecamatan Bontomanai kabupaten kepulauan Selayar.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggungjawaban atas tindakan individual atau organisasi yang telah diamanatkan. Menurut Widodo dalam (Sholiha, 2024) akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang di lakukan secara periodik. Perspektif fungsional menurut Mardiasmo dalam (Sholiha, 2024) akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi, Mardiasmo dalam (Sholiha, 2024) menyebutkan bahwa:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum; akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses; terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi.
3. Akuntabilitas program; terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan; terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) adalah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa. Sistem ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Siskeudes merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, terhitung

sejak tanggal 13 Juli 2015 aplikasi ini diambil alih oleh BPKP Jakarta, dimana sebelumnya aplikasi ini dikembangkan oleh perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan dilingkungan BPKP pada bulan Mei 2015 (Ratna dan Harahap, 2023). Aplikasi SISKEUDES dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi siskeudes, yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif (Baiq, dkk., 2022).

Melalui fitur yang tersedia, SISKEUDES memudahkan perangkat desa dalam melakukan pencatatan keuangan secara *real time* dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Aplikasi ini juga membantu menyusun laporan keuangan desa secara otomatis, mengurangi kesalahan manual, serta mempercepat proses audit dan evaluasi. Dengan adanya SISKEUDES, desa dapat lebih fokus pada implementasi kegiatan pembangunan tanpa terbebani oleh pencatatan manual yang kompleks.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh empat karakteristik utama menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu: relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu kebijakan yang telah diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah pelaksanaan kebijakan, dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan atau penyusunan kebijakan selanjutnya. Dalam konteks penelitian, evaluasi kebijakan digunakan untuk menganalisis implementasi suatu program atau sistem, seperti SISKUDES, guna melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan di lapangan (Pramono, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana aplikasi SISKEUDES digunakan dalam pengelolaan laporan keuangan di desa. Penelitian ini menitikberatkan pada pengalaman, pandangan, serta kondisi nyata yang dihadapi oleh aparat desa dalam penerapan sistem tersebut.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam mengenai SISKEUDES dan kendala yang dihadapi perangkat desa. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menggali pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman dan persepsi perangkat desa terkait penggunaan sistem tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan SAP berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan fokus utama pada evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas keuangan desa. Dalam penelitian ini dilakukan teknik wawancara kepada tiga informan utama yang paling mengetahui proses pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa, bendahara desa, dan staf administrasi keuangan secara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi sesuai daftar pertanyaan namun tetap memberi ruang pada narasumber untuk menjelaskan secara lebih luas terkait aplikasi SISKEUDES.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi, khususnya pada proses input data keuangan desa. Peneliti juga mengumpulkan dokumen terkait, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Tabel 1. Profil Narasumber

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Inisial
1.	Nur Kamar, S.Kel	Kepala Desa	Laki – Laki	IF.1
2.	Andi Kartia	Bendahara Desa	Perempuan	IF.2
3.	A. Asmaul Husna	Staf Adminitraasi Keuangann	Perempun	IF.3

Sumber: Data primer hasil wawancara Di Desa Parak IF: Informan 2024

Pembahasan

Pada pembahasan penelitian ini ada beberapa aspek yang menjadi indikator, dalam evaluasi Kualitas laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, PP No. 71 Tahun 2010), yaitu: relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Namun diawali dari indikator Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan fondasi dari seluruh siklus pengelolaan keuangan desa. Tanpa perencanaan yang baik, maka seluruh tahapan berikutnya (penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) akan mengalami kendala baik dari sisi substansi maupun administrasi. Sebelum penerapan SISKEUDES, perencanaan di Desa Parak dilakukan secara manual. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) biasanya hanya dituangkan dalam notulen, lalu diolah kembali menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Proses ini rawan menimbulkan masalah, mulai dari keterlambatan penyusunan dokumen, data yang tercecer, hingga kesalahan pencatatan. Bendahara Desa menuturkan,

“sebelum ada sistem, banyak usulan musyawarah desa yang kadang hilang atau tidak tercatat dengan baik” (IF.2).

Setelah penggunaan SISKEUDES sejak 2017, perubahan signifikan terlihat. Sistem memungkinkan hasil Musdes langsung di input dalam format baku yang telah disediakan aplikasi. Dokumen perencanaan desa menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi. Kepala Desa menjelaskan,

“sejak 2017 dengan pendampingan BPKP, perencanaan lebih cepat dan terstruktur” (IF.1).

Dengan demikian, perangkat desa tidak perlu lagi mengetik ulang data hasil Musdes, karena aplikasi telah menyediakan menu perencanaan yang otomatis terhubung dengan tahapan berikutnya.

Analisis kritis menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES dalam tahap perencanaan telah membawa dua dampak utama:

- a. Dalam Efisiensi waktu, dokumen perencanaan lebih cepat selesai dibandingkan cara manual.
- b. Kualitas data lebih baik ditunjukkan dengan hasil Musdes terdokumentasi dengan baik, meminimalisasi risiko kehilangan data.

2. Penganggaran

Penganggaran merupakan inti dari siklus pengelolaan keuangan desa, karena melalui tahap inilah ditentukan arah pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Anggaran desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki makna politis dan strategis, sebab menyangkut pilihan prioritas pembangunan yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Sebelum adanya aplikasi SISKEUDES, proses penganggaran di Desa Parak berlangsung dengan cara yang relatif konvensional. Aparatur desa menggunakan buku kas dan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel untuk menyusun APBDes. Pola manual ini mengandung sejumlah kelemahan. Pertama, membutuhkan waktu yang lama karena setiap pos belanja dan pendapatan harus dimasukkan serta dihitung secara manual. Kedua, rawan kesalahan perhitungan sehingga sering kali penyusunan APBDes mengalami keterlambatan. Ketiga, format laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai standar pemerintah, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan atau evaluasi oleh kecamatan maupun inspektorat, aparat desa harus melakukan

penyesuaian tambahan. Bendahara Desa menuturkan bahwa

“dulu laporan keuangan sering terlambat, kalau ada salah hitung kami harus cek ulang dari awal” (IF.2) .

Hal ini menggambarkan betapa sistem manual sangat rentan terhadap inefisiensi, baik dari segi waktu maupun tenaga.

Transformasi signifikan mulai terjadi sejak tahun 2017 ketika Desa Parak secara resmi mulai menggunakan aplikasi SISKEUDES. Sistem ini dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instrumen yang dapat mendukung tata kelola keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel. Pada tahap penganggaran, SISKEUDES menyediakan menu khusus yang langsung terhubung dengan data perencanaan yang telah disusun dalam RKPDDes. Artinya, setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat secara otomatis diturunkan menjadi rincian anggaran dalam format APBDDes.

Kepala Desa Parak mengakui bahwa

“sekarang perencanaan kegiatan jadi lebih mudah karena semua rincian sudah ada di aplikasi. Laporan juga lebih cepat selesai dan sesuai dengan standar pemerintah” (IF.1).

Secara teoritis, digitalisasi penganggaran melalui aplikasi SISKEUDES sejalan dengan gagasan *e-government* yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi. penerapan sistem informasi keuangan desa dapat mempercepat proses penyusunan APBDDes, mengurangi potensi manipulasi data, serta memperkuat posisi desa dalam pertanggungjawaban publik.

SISKEUDES secara nyata menurunkan risiko human error karena sistem telah menstandarkan perhitungan, format, serta struktur laporan sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri. Dengan kata lain, keberadaan aplikasi ini bukan hanya mempermudah teknis penganggaran, tetapi juga memperkuat landasan akuntabilitas keuangan desa.

Dengan demikian, tahap penganggaran di Desa Parak setelah penerapan SISKEUDES dapat dikatakan mengalami lompatan besar. Dari yang semula manual, memakan waktu lama, rawan salah hitung, dan formatnya belum seragam, kini berubah menjadi sistematis, cepat, akurat, dan sesuai dengan regulasi. Walaupun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan kompetensi SDM, secara keseluruhan penerapan SISKEUDES telah membawa dampak positif terhadap kualitas penganggaran desa. Hal ini memperkuat posisi Desa Parak dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa karena mencakup seluruh aktivitas pencatatan, pengendalian, dan pelaksanaan transaksi yang berlangsung sehari-hari. Jika perencanaan dan penganggaran bersifat strategis, maka penatausahaan lebih menekankan pada teknis operasional yang harus akurat dan konsisten

Sebelum adanya SISKEUDES, proses penatausahaan di Desa Parak dilakukan secara manual. Setiap transaksi, baik penerimaan maupun

pengeluaran, dicatat di buku kas oleh bendahara, lalu secara berkala dipindahkan ke Microsoft Excel untuk keperluan rekapitulasi. Pola ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, pencatatan manual rawan terjadi *human error*, misalnya salah jumlah atau ganda dalam input. Kedua, rekapitulasi membutuhkan waktu lama karena harus dilakukan ulang di Excel. Ketiga, dokumen transaksi kerap

tercecer atau tidak terdokumentasi secara baik, sehingga menyulitkan ketika ada pemeriksaan mendadak. Staf administrasi keuangan menuturkan:

“Karena manual, kami harus ketik ulang banyak data. Kalau ada perubahan, biasanya harus edit dari awal. Itu membuat pekerjaan jadi lebih lambat” (IF.3)

Penerapan aplikasi SISKEUDES memberikan dampak nyata terhadap proses penatausahaan di Desa Parak. Sistem yang berbasis digital ini mampu meningkatkan efisiensi karena seluruh data dapat langsung dicatat ke dalam aplikasi tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu. Bendahara desa mengungkapkan bahwa pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu sehari-hari, seperti pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Hal ini disebabkan oleh tersedianya format laporan secara otomatis dalam aplikasi sehingga pengguna tidak perlu lagi membuat dari awal. Ia menuturkan:

“Sekarang memasukkan data jauh lebih mudah, format laporan sudah tersedia, jadi tidak perlu buat dari nol” (IF.2)

Dari perspektif *good governance*, tahap penatausahaan yang menggunakan SISKEUDES memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas tercermin dari adanya rekam jejak transaksi yang terdokumentasi secara digital, sehingga ketika dilakukan audit oleh inspektorat, proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat. Transparansi meningkat karena data transaksi dapat diakses sewaktu-waktu oleh pihak berwenang tanpa harus membuka kembali arsip manual.

Namun, penerapan SISKEUDES dalam penatausahaan juga menghadapi sejumlah kendala. Pertama, masalah teknis seperti *error* sistem atau gangguan jaringan dapat menyebabkan data yang sudah diinput hilang, sehingga harus diulang. Staf administrasi keuangan menyampaikan:

“Setiap kali buka aplikasi, kami harus login ulang dan memasukkan kode. Kalau ada error, data yang sudah diinput kadang hilang dan harus dikerjakan lagi dari awal” (IF.3)

Kedua, kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan, terutama bagi perangkat desa yang belum terbiasa dengan komputer. Meskipun pelatihan telah diberikan, masih diperlukan pendampingan intensif agar penggunaan sistem semakin optimal.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan salah satu fase terpenting dalam siklus pengelolaan keuangan desa, karena pada tahap inilah seluruh proses yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan bermuara dalam bentuk dokumen laporan yang bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara periodik, baik kepada pemerintah kabupaten/kota maupun kepada masyarakat. Kewajiban ini menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh pemerintah desa.

Sebelum hadirnya aplikasi SISKEUDES, pelaporan di Desa Parak masih dilakukan secara manual. Setiap transaksi yang dicatat di buku kas harus direkap ulang secara manual ke dalam Excel, kemudian dipindahkan ke dalam format laporan keuangan desa. Proses ini tentu saja memakan waktu lama, sering kali hingga berminggu-minggu, dan menimbulkan potensi kesalahan hitung yang besar. Bendahara Desa Parak mengungkapkan,

“Dulu laporan keuangan sering terlambat. Kalau ada salah hitung, kami harus cek ulang dari awal. Arsip laporan juga tidak rapi dan butuh waktu lama kalau mau diperiksa” (IF.2)

Perubahan signifikan mulai terasa sejak tahun 2017 ketika Desa Parak mulai menerapkan SISKEUDES. Aplikasi ini dilengkapi dengan modul pelaporan yang

secara otomatis mengompilasi seluruh data keuangan yang telah di input sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan. Dengan demikian, aparat desa tidak lagi harus menyusun laporan dari nol, melainkan cukup menarik data yang telah tersedia di dalam sistem. Kepala Desa menuturkan,

"Laporan sekarang lebih cepat selesai dan sesuai dengan format pemerintah, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan" (IF.1)

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan SISKEUDES dalam tahap pelaporan tidak lepas dari kendala teknis. Infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil sering menghambat sinkronisasi laporan ke tingkat kabupaten. Kepala Desa Parak mengakui,

"Kendala terbesar biasanya jaringan internet. Kalau sinyal jelek, proses sinkronisasi laporan sering tertunda" (IF.1)

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan fase akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, di mana pemerintah desa menyampaikan hasil pengelolaan keuangan secara resmi kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah supra desa (kecamatan, kabupaten, hingga pusat), maupun kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung dari dana desa. Dalam konteks regulasi, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara tegas menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kewajiban ini menegaskan posisi pertanggungjawaban sebagai instrumen utama untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi penggunaan dana publik di tingkat desa.

Sebelum adanya SISKEUDES, proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban di Desa Parak sering kali mengalami keterlambatan. Hal ini karena setiap dokumen harus direkap manual, disesuaikan kembali dengan bukti transaksi, lalu dicocokkan dengan laporan yang sudah dibuat di Excel. Proses yang panjang tersebut tidak jarang menimbulkan masalah administratif, seperti inkonsistensi antara laporan realisasi anggaran dengan bukti pengeluaran. Staf administrasi keuangan menceritakan,

"Karena manual, kami harus ketik ulang banyak data. Kalau ada perubahan, biasanya harus edit dari awal. Itu membuat pekerjaan jadi lebih lambat" (IF.3)

Sejak penerapan SISKEUDES pada tahun 2017, sistem pertanggungjawaban keuangan Desa Parak mengalami transformasi yang signifikan. Aplikasi ini memungkinkan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara otomatis berdasarkan data yang sudah di input sepanjang tahun anggaran. Bendahara Desa Parak menuturkan, "Kesalahan hitung sekarang hampir tidak ada karena sistem menghitung otomatis. Laporan juga lebih lengkap dan sesuai aturan"

Pernyataan ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SISKEUDES tidak hanya mempercepat penyusunan dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga meningkatkan kualitas isi laporan, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

Meski demikian, pertanggungjawaban berbasis SISKEUDES di Desa Parak tidak lepas dari kendala. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi sering menghambat proses finalisasi laporan, terutama ketika harus melakukan sinkronisasi data ke tingkat kabupaten. Kepala Desa menyatakan,

"Kalau jaringan jelek, proses sinkronisasi laporan sering tertunda" (IF.1)

Kedua, faktor sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan. Tidak semua aparat desa memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk memahami detail sistem, sehingga pertanggungjawaban masih bergantung pada staf tertentu.

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik yang dimaksud terdiri atas empat hal, yaitu relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Keempat karakteristik ini menjadi standar normatif yang wajib diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan agar informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi para pengguna. Dalam konteks Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi instrumen yang memastikan keempat karakteristik tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

6. Relevansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No. 71 Tahun 2010, relevansi merupakan salah satu karakteristik kualitatif utama laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan relevan apabila dapat memengaruhi keputusan pengguna, baik dalam menilai peristiwa masa lalu, mengevaluasi kondisi masa kini, maupun memprediksi keadaan di masa depan. Unsur penting relevansi mencakup manfaat prediktif, manfaat umpan balik, ketepatan waktu, serta kelengkapan data. Tanpa adanya relevansi, laporan keuangan hanya akan menjadi dokumen administratif yang kurang bernilai dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian di Desa Parak menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES telah memperkuat relevansi laporan keuangan desa. Sebelum adanya aplikasi ini, perangkat desa menyusun laporan keuangan secara manual menggunakan buku kas dan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel. Proses manual ini sering menimbulkan keterlambatan penyusunan laporan, bahkan terkadang ada data musyawarah desa yang hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik. Bendahara Desa Parak menyebutkan bahwa *"sebelum ada sistem, banyak usulan musyawarah desa yang kadang hilang atau tidak tercatat dengan baik"* (IF.2).

Kondisi tersebut membuat informasi keuangan desa kurang relevan karena tidak dapat segera digunakan dalam proses evaluasi dan perencanaan pembangunan.

Sejak penerapan SISKEUDES pada tahun 2017 dengan pendampingan BPKP, perubahan signifikan terjadi. Aplikasi ini memungkinkan hasil musyawarah desa langsung di input ke dalam format baku yang tersedia di sistem. Hal ini membuat perencanaan desa terdokumentasi dengan lebih baik dan terhubung secara otomatis dengan tahap penganggaran. Kepala Desa menegaskan bahwa

"sejak 2017 dengan pendampingan BPKP, perencanaan lebih cepat dan terstruktur" (IF.1).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa SISKEUDES meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen, sehingga laporan keuangan dapat segera disajikan sesuai kebutuhan.

Selain ketepatan waktu, relevansi juga tercermin dari kelengkapan data yang tersedia. Melalui fitur SISKEUDES, setiap transaksi keuangan yang terjadi dicatat langsung dalam sistem dengan dilengkapi bukti pendukung. Hal ini mengurangi risiko adanya data yang tercecer atau tidak terdokumentasi. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah desa dapat menilai secara lebih akurat penggunaan anggaran, melakukan realokasi jika diperlukan, dan menyusun kebijakan pembangunan berikutnya berdasarkan informasi yang nyata.

Dari sisi manfaat prediktif, laporan keuangan yang dihasilkan SISKEUDES dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Misalnya, desa dapat menilai program mana yang realisasinya rendah sehingga perlu perbaikan, dan program mana yang penyerapannya tinggi sehingga layak untuk dipertahankan. Sedangkan dari sisi manfaat umpan balik, laporan yang dihasilkan memungkinkan perangkat desa dan masyarakat menilai sejauh mana perencanaan yang telah disusun benar-benar terlaksana sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain,

informasi dari laporan keuangan desa tidak hanya bersifat historis, tetapi juga berguna untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan dan memperbaiki perencanaan ke depan.

Dengan adanya SISKEUDES, Desa Parak mampu menyajikan informasi yang relevan karena laporan keuangan kini disusun lebih cepat, lengkap, dan langsung terhubung dengan dokumen perencanaan serta penganggaran. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem tidak hanya memperbaiki aspek administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi sebagai alat pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Relevansi laporan keuangan Desa Parak yang meningkat menjadi bukti bahwa SISKEUDES berfungsi efektif sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.

7. Keandalan

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), keandalan merupakan karakteristik kualitatif yang sangat penting. Informasi dalam laporan keuangan disebut andal apabila bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, menggambarkan kondisi secara jujur, dapat diverifikasi, serta bersifat netral. Artinya, informasi yang disajikan tidak hanya benar secara angka, tetapi juga mencerminkan keadaan sebenarnya sesuai bukti transaksi yang ada. Keandalan sangat penting karena menjadi dasar bagi pengguna laporan untuk menaruh kepercayaan terhadap informasi yang disajikan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Parak, penerapan SISKEUDES terbukti memperkuat keandalan laporan keuangan desa. Sebelum penggunaan aplikasi, pencatatan transaksi dilakukan secara manual melalui buku kas harian, kemudian direkap kembali di Microsoft Excel. Proses ganda ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rawan menimbulkan kesalahan perhitungan maupun inkonsistensi antara catatan kas dengan laporan akhir.

Bendahara Desa Parak menuturkan bahwa

“dulu laporan keuangan sering terlambat, kalau ada salah hitung kami harus cek ulang dari awal” (IF.2).

Hal ini menunjukkan bahwa laporan yang dihasilkan secara manual belum sepenuhnya andal, karena risiko kesalahan input dan perhitungan cukup tinggi.

Selain itu, keterbatasan dokumentasi juga memengaruhi keandalan. Bukti transaksi seperti kuitansi atau nota terkadang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga ketika ada pemeriksaan mendadak, perangkat desa kesulitan mencocokkan laporan dengan bukti fisik. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan auditor maupun masyarakat terhadap laporan keuangan desa.

Setelah penerapan SISKEUDES, keandalan laporan meningkat secara signifikan. Sistem ini melakukan perhitungan secara otomatis sehingga meminimalisasi kesalahan hitung. Setiap transaksi yang di input langsung terhubung dengan akun terkait, sehingga laporan keuangan dapat tersaji lebih konsisten dan sesuai standar pemerintah. Staf administrasi keuangan Desa Parak menjelaskan bahwa

“sekarang memasukkan data jauh lebih mudah, format laporan sudah tersedia, jadi tidak perlu buat dari nol” (IF.3).

Hal ini berarti laporan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih akurat dan konsisten dengan standar yang berlaku. Netralitas juga tercermin dari penggunaan SISKEUDES. Sistem ini menghasilkan laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tidak bisa dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu. Informasi yang dihasilkan lebih objektif, karena struktur dan isinya telah dibakukan. Keandalan laporan Desa Parak juga mendapat pengakuan dari pihak inspektorat yang melakukan pemeriksaan rutin, di mana laporan dinilai sesuai dengan

standar meskipun masih ada catatan teknis terkait kelengkapan dokumen fisik.

Namun beberapa kendala tetap muncul yang dapat memengaruhi keandalan, seperti gangguan jaringan internet atau sistem yang tiba-tiba *error*.

Staf administrasi menyebutkan bahwa

“kalau ada error, data yang sudah di input kadang hilang dan harus dikerjakan lagi dari awal” (IF.3).

Meski kendala ini bersifat teknis, tetap berpotensi mengganggu konsistensi data apabila tidak segera ditangani dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur teknologi tetap menjadi syarat penting agar keandalan laporan keuangan tetap terjaga.

Dengan penerapan SISKEUDES di Desa Parak telah meningkatkan keandalan laporan keuangan, baik dari segi akurasi, konsistensi, verifikasi, maupun netralitas. Sistem ini membantu meminimalkan kesalahan manual, menyediakan rekam jejak transaksi yang dapat ditelusuri, serta menyajikan informasi yang dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan

prinsip SAP bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang benar, jujur, dan obyektif.

8. Dapat Dibandingkan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karakteristik dapat dibandingkan berarti laporan keuangan harus disusun secara konsisten dari waktu ke waktu agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Tujuannya adalah agar pengguna laporan dapat menilai kecenderungan (*trend*) kinerja keuangan, melihat perubahan yang terjadi, dan melakukan evaluasi secara lebih objektif. Perbandingan dapat dilakukan secara internal, yaitu antar periode dalam entitas yang sama, maupun secara eksternal, yaitu dengan entitas lain yang memiliki karakteristik dan standar penyusunan laporan yang sama.

Hasil penelitian di Desa Parak menunjukkan bahwa sebelum penerapan SISKEUDES, laporan keuangan sulit dibandingkan antar periode. Hal ini disebabkan karena format laporan sering berubah-ubah mengikuti kebiasaan bendahara yang menyusunnya secara manual, baik menggunakan buku kas maupun Microsoft Excel. Tidak jarang, laporan yang dibuat pada satu tahun berbeda strukturnya dengan tahun berikutnya. Akibatnya, perangkat desa maupun pihak kecamatan kesulitan melakukan evaluasi kinerja keuangan desa karena data tidak disajikan secara seragam.

Selain itu, perbandingan antar entitas juga sulit dilakukan karena setiap desa cenderung menggunakan format laporan yang berbeda. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah mengalami kendala dalam melakukan konsolidasi data dan menilai capaian kinerja antar desa secara menyeluruh.

Transformasi mulai terjadi ketika SISKEUDES resmi digunakan oleh Desa Parak pada tahun 2017. Aplikasi ini menghasilkan laporan dengan format baku yang konsisten setiap tahun, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Buku Kas Umum, dan laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya standar format tersebut, laporan antar periode dapat dibandingkan secara lebih mudah.

Kepala Desa Parak menyebutkan bahwa

“laporan sekarang lebih cepat selesai dan sesuai dengan format pemerintah, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan” (IF.1).

Konsistensi format inilah yang memungkinkan laporan Desa Parak dapat dievaluasi secara internal dari tahun ke tahun. Dari sisi eksternal, keseragaman format yang dihasilkan SISKEUDES memungkinkan laporan Desa Parak dibandingkan dengan laporan desa lain yang juga menggunakan aplikasi ini. Hal

ini memudahkan pemerintah kabupaten dalam melakukan konsolidasi dan analisis komparatif. Misalnya, pemerintah daerah dapat membandingkan realisasi belanja antar desa untuk menilai efektivitas penggunaan dana desa di wilayah kecamatan Bontomanai. Selain memudahkan pemerintah dalam evaluasi, konsistensi format laporan juga membantu masyarakat dalam memahami informasi keuangan desa.

Dengan pola penyajian yang seragam setiap tahun, masyarakat dapat lebih mudah membandingkan capaian pembangunan yang didanai oleh APBDDes. Hal ini meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah desa kepada warganya.

9. Dapat Dipahami

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No. 71 Tahun 2010, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna. Karakteristik ini menekankan bahwa laporan keuangan harus disusun dengan bahasa yang jelas, format yang sistematis, dan istilah yang sesuai standar akuntansi. Meskipun pengguna laporan diasumsikan memiliki tingkat pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas pemerintahan dan akuntansi, penyajian yang transparan tetap diperlukan agar informasi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Laporan yang sulit dipahami akan kehilangan nilai gunanya karena tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, baik bagi aparat desa, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Hasil penelitian di Desa Parak menunjukkan bahwa sebelum menggunakan SISKEUDES, laporan keuangan sering kali sulit dipahami. Hal ini disebabkan karena pencatatan manual membuat laporan disusun tidak seragam dari tahun ke tahun. Format laporan berubah-ubah tergantung kebiasaan bendahara atau staf administrasi yang menyusunnya. Akibatnya, meskipun data transaksi sudah ada, penyajiannya tidak sistematis dan terkadang membingungkan, baik bagi auditor maupun masyarakat yang ingin menilai pertanggungjawaban pemerintah desa. Bendahara Desa menuturkan bahwa:

"kalau ada salah hitung, kami harus cek ulang dari awal. Arsip laporan juga tidak rapi dan butuh waktu lama kalau mau diperiksa" (IF.2).

Hal ini memperlihatkan bahwa selain rawan kesalahan, laporan manual juga sulit dipahami karena tidak disusun dalam format baku yang mudah diikuti.

Setelah penerapan SISKEUDES, kualitas pemahaman laporan keuangan Desa Parak meningkat secara signifikan. Aplikasi ini menyediakan format laporan yang jelas dan sistematis, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), buku kas umum, hingga laporan pertanggungjawaban. Informasi keuangan tidak hanya disajikan dalam bentuk total angka, tetapi juga dirinci berdasarkan kode rekening, jenis belanja, dan program pembangunan. Dengan adanya rincian tersebut, aparat desa lebih mudah menjelaskan isi laporan kepada masyarakat maupun pihak eksternal. Staf administrasi Desa Parak menyebutkan bahwa

"sekarang memasukkan data jauh lebih mudah, format laporan sudah tersedia, jadi tidak perlu buat dari nol" (IF.3).

Dengan demikian, laporan tidak hanya lebih cepat dibuat, tetapi juga lebih mudah dipahami karena disusun sesuai standar pemerintah.

Dari sisi masyarakat, pemahaman meningkat karena laporan yang dihasilkan SISKEUDES lebih transparan. Masyarakat awam kini dapat mengetahui bagaimana dana desa dialokasikan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau belanja rutin desa. Hal ini membuat forum pertanggungjawaban desa menjadi lebih bermakna karena warga dapat menilai dan memberikan masukan berdasarkan data yang jelas.

Kepala Desa menegaskan bahwa

"laporan sekarang lebih cepat selesai dan sesuai dengan format pemerintah, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan" (IF.1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman laporan bukan hanya bermanfaat bagi perangkat desa, tetapi juga meningkatkan legitimasi pertanggungjawaban di mata masyarakat.

Penelitian ini menemukan kendala yang berhubungan dengan pemahaman, terutama terkait keterampilan sumber daya manusia. Tidak semua aparat desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi atau memahami istilah teknis akuntansi yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun laporan sudah disajikan dengan format baku, diperlukan pelatihan berkelanjutan agar seluruh perangkat desa dapat memahami isi laporan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan jaringan internet juga terkadang menghambat proses sinkronisasi data, sehingga informasi yang seharusnya sudah siap dilaporkan ke tingkat kabupaten tidak bisa segera diakses oleh pihak yang membutuhkan.

Penerapan SISKEUDES di Desa Parak telah meningkatkan pemahaman laporan keuangan. Laporan kini disusun dengan sistematis, menggunakan istilah dan format yang sesuai standar pemerintah, serta dilengkapi dengan rincian yang memudahkan pemahaman oleh berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip SAP bahwa laporan keuangan tidak hanya harus benar secara teknis, tetapi juga harus dapat dipahami agar informasi yang terkandung di dalamnya benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemahaman laporan yang dihasilkan SISKEUDES mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, menjadi lebih teratur, transparan, dan akuntabel dibandingkan dengan pola manual yang sebelumnya digunakan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada aspek teknis pencatatan dan penyusunan dokumen, tetapi juga pada kualitas informasi yang dihasilkan, yang kini semakin sesuai dengan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *Good Governance*, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji topik serupa dengan pendekatan dan konteks wilayah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. (2014). *Analisis faktor pendukung implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD*. 3rd Economics & Business Research Festival. <https://repository.uksw.edu/server/api/core/bitstreams/48e483ec-a8ad-4c59-9134-22c3c5d433ce/content>
- Al-Hiyari, A., Al-Mashregy, M. H. H., Mat, N. K. N., dan Alekam, J. M. (2013). *Factors that affect accounting information system implementation and accounting information quality: A survey in University Utara Malaysia*. American Journal of Economics, 3(1), 27-31. DOI: 10.5923/j.economics.20130301.06

- Baiq Fariesta Auliantari, Eni Indriani, dan Yusli Mariadi. (2022). *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Di Desa Jatisela*. Jurnal Risma. Vol. 2 No. 3 September 2022. 416-433. DOI: <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.255>
- Danuta, K. S. (2017). *Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam pencegahan fraud pada proses pengadaan melalui e-procurement*. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(2), 158.
- Fauzi, R., Amelda, dan Sihabudin (2024). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Telukbuyung Kabupaten Karawang*. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(1), 127-135. DOI [10.35870/jimik.v5i1.438](https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.438)
- Gofi, H. (2019). *Pengaruh Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel pemoderasi (Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Pedan)* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).
- Hajri, R., & Razak, L. A. (2023). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*. *Tangible Journal*, 8(1), 64-71. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.341>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Pramono, Joko S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Maulana, M. A., Ubaedillah, U., dan Rizqi, Z. F. (2022). *Hubungan Level Good Governance Kepala Sekolah dengan Keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar*. *The Academy Of Management and Business*, 1(3), 134-144. <https://doi.org/10.55824/tamb.v1i3.184>
- Pradono, F. C. (2015). *Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan (Studi pada SKPD pemerintah provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 22(2).
- Puspasari, O. R., dan Purnama, D. (2018). *Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kuningan*. Jurnal Kajian Akuntansi, 2(2), 145-159.
- Rahmawati, M., dan Fajar, C. M. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1).
- Ramadhan, R. (2014). *Analisis perbandingan pengelolaan keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007*.
- Ratna dan Ahmat Harahap. (2023). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/IAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/IAPB). Volume 6 Nomor 1, 2023. 200-211.
- Rifandi, Z. W. (2019). *Pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi*

sumber daya manusia, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 4(1), 1-17.
<http://dx.doi.org/10.35448/jratirtayasa.v4i1.4505>

- Romney, M. B., dan Steinbart, P. J. (2015). *Accounting information systems* (13th ed.). London: Pearson Education Limited.
- Sholiha, I., dan Casmiwati, D. (2024). *Analisis Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tambaksari Dalam Menerapkan Good Governance*. Indonesian Journal of Public Administration Review, 1(4), 11- 11.
- Sulistyowati, S., dan Fitriyah, E. (2019). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Studi kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*. International Journal of Social Science and Business, 3(3), 299-305.